

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK BELANJA MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO

Oleh:

Sitti Maryam Mohamad¹**Jantje. J Tinangon²****Inggriani Elim³**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹Sithy_mohamad257@yahoo.com²Tinangonjannyjantje@yahoo.co.id³Elim_inggriani@yahoo.co.id**ABSTRAK**

Otonomi dan desentralisasi menuntut Pemerintah Daerah untuk bisa mengelola dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Belanja daerah merupakan instrument penting karena belanja daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. Menurut Permendagri No. 17 tahun 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 belanja daerah terdiri dari belanja Operasi dan belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud dan aset tetap lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Sebaiknya Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado menambah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja institusi

Kata kunci: akuntansi keuangan daerah, belanja daerah, belanja modal

ABSTRACT

Autonomy and decentralization to claim of region governance for can managing and to regulate the region financial. In th start of wheel governance, budget line is a instrument interest because expanse is a expending which to use for to pay that programme and activity. According a Permendagri No 17 tahun 2006. Budget line is a eexpending account cash general of statement/ region which to decrease of equity fund fluet in this periode estimation. Follow it PP No 71, 2010 about standardaccounting governance expanse of region comprise with of operasional budget an capita expenditure. Capital expenditure is a expending to estimation for purchase/ provisions of tangible fixed aset and other aset which give to bonenefit period more than one periode accounting. The object in this study were is Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Data analysis method used in this research is descriptive method. And from thee rsearch it can be concluded that the application of accounting for capital eexpenditure in Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado already to fit with PP No 71, 2010 and then Direct in Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sould be added human resources which have a skillaccounting for can make financial statement is true for to amount in Potency of institute

Keywords: accounting financial region, budget line, expenditure capital

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pada kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.

Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah line item budget yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Sementara itu analisis mendalam mengenai struktur, komponen dan tingkat biaya dari setiap kegiatan belum pernah dilakukan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan SAP harus digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan ini diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan kini Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan adanya PP No. 71 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No. 24 tahun 2005, kini SAP didasarkan pada basis Akrua (PP Nomor 71 Tahun 2010) tentang standar akuntansi pemerintahan.

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam struktur pemerintahan daerah satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan transaksi transaksi yang terjadi di dalam lingkungan satuan kerja, dalam intruksi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja perangkat daerah yaitu: (1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (2) Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses pencatatan atas pendapatan, belanja aset dan selain aset dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas pekerjaan umum kota manado sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010

KAJIAN TEORI

Organisasi Sektor Publik

Organisasi adalah sekelompok orang yang berkerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah sasaran yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi mempunyai tujuan spesifik yang hendak dicapai dan memerlukan managen yang baik agar bisa mencapai tujuan tersebut, tujuan tersebut dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dapat dibagi menjadi tujuan yang bersifat financial maupun non financial. Tujuan

dari setiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi pada dasarnya terdapat 4 tipe organisasi Mahsun (2006:26) :

1. *Pure profit organization*
Pure profit organization adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan tujuan utama untuk memperoleh laba sebanyak banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik
2. *Quasi profit organization*
Quasi profit organization adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk memperoleh laba dan mencapai tujuan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik
3. *Quasi non profit organization*
Quasi non profit organization adalah organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.
4. *Pure non profit organization*
Pure non profit organization adalah organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:11) mendefinisikan Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga lembaga tinggi Negara dan departemen departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, BUMN BUMD, LSM pada sektor dan yayasan sosial. maupun pada proyek proyek kerjasama pada sektor publik dan swasta

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat efisien dan ekonomis suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*Manajemen control*)
2. Memberikan informasi yang memungkinkan para menejer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Dan memungkinkan bagi pegawai pemerintahan untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas (*accountability*)

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim & Kusnufi (2010:48) Menyatakan Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Pihak pihak eksternal dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan Pengawas keuangan, investor, dan kreditor. Pada entitas pemerintah daerah laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut ;

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Neraca
3. Laporan Arus kas dan
4. Catatan atas Laporan keuangan

PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang harus dihasilkan oleh pemerintah daerah selambat lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
2. Pelaporan Financial (financial reports)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Arus kas
 - d. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala satuan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. (Halim & Iqbal (2007:23)

Managemen Belanja

Pelayanan publik adalah tujuan utama dari organisasi pemerintahan hal ini yang membedakan dengan organisasi bisnis/perusahaan dalam hal ini laba bukan merupakan tujuan utama pemerintah, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu proses pencapaian laba yang tinggi pada organisasi bisnis dengan meningkatkan pendapatan dan menekan biaya tidak semata-mata bisa diadopsi. pemerintahan terutama pemerintahan daerah. Bahkan belanja pemerintahan menjadi instrumen penting dalam menstimulasikan perekonomian daerah. Tidak seperti di perusahaan dimana manajemen dituntut untuk menekan biaya/belanja serendah mungkin di pemerintah daerah, kepala daerah justru diminta untuk membelanjakan dana yang mereka kelola sebaik mungkin sebab sebagian belanja tersebut dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dalam hal ini manajemen belanja sangat penting dilakukan agar dana yang dibelanjakan sejalan dengan semangat efektifitas dan efisiensi pemerintahan. Mahmudi (2010:48) menjabarkan empat (4) prinsip manajemen belanja pemerintahan yaitu :

1. Perencanaan Belanja
2. Pengendalian Belanja

Belanja Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 paragraf 08 menyebutkan belanja adalah pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Tanjung (2007 :38) Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan bersih daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah di bagi menjadi dua jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan Belanja langsung di kelompokkan menjadi
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
2. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung di kelompokkan menjadi :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Bantuan Sosial
 - f. Belanja Bagi Hasil

Perlakuan Akuntansi untuk Belanja Daerah

Untuk mencatat realisasi belanja menggunakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran berdasarkan (SPJ) fungsional yang sudah disahkan fungsi akuntansi pada SKPD adalah sebagai berikut

Dr Belanja.... xxx
 Cr Kas di bendahara pengeluaran SKPD xxx

Jurnal tersebut akan selalu dibuat untuk mencatat setiap realisasi belanja dengan menggunakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan di tambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi: Belanja Modal tanah, Belanja Modal peralatan dan mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan, Belanja modal aset tetap lainnya, Belanja aset lainnya (aset tidak berwujud).

Jurnal untuk belanja modal
 Dr Belanja modal... xxx
 Cr Kas di bendahara pengeluaran SKPD xxx

Jenis jenis Belanja modal

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan mesin
3. Belanja Gedung dan bangunan
4. Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan
5. Aset tetap lainnya

6. Belanja aset lainnya

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Penelitian Terdahulu

1. Cicilia (2012) dengan judul Analisis perlakuan Akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten minahasa utara tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada belanja daerah pemerintah kabupaten minahasa utara sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode Deskriptif hasil penelitian menunjukkan Penerapan akuntansi untuk belanja daerah pada dinas kesehatan pemerintah kabupaten minahasa utara sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku
2. Galeanto (2012) dengan Judul Analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah (PPAKD) di kabupaten luwuk banggai tujuan ini Untuk mengetahui kinerja belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (PPAKD) di kabupaten luwuk banggai metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja belanja pemerintah daerah luwuk banggai dari TA 2007 sampai dengan TA 2010 menunjukkan kinerja yang baik

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif, yang meliputi pengumpulan data untuk diuji Hipotesis untuk menjawab pertanyaan status terakhir dari objek penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado yang beralamat di JL Ring Road Tingkulu Teling penelitian ini dilakukan pada bulan juli 2014

Prosedur Penelitian

1. Studi Pendahuluan
2. Menentukan Permasalahan
3. Menentukan metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara
4. Mengolah data
5. Menarik kesimpulan

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan data Kualitatif menurut Kuncoro (2009 :145) Data Kuantitatif adalah data yang dapat diukur dengan skala numerik (angka), data Kuantitatif yang diperoleh dari penelitian ini adalah buku kas umum dan laporan realisasi anggaran, data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik, data kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran umum tentang Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data Primer yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan dan menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari Dinas Pekerjaan Umum kota Manado

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data data primer dengan datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado kemudian melakukan wawancara langsung dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dan melakukan penelusuran penelusuran terhadap dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode pembahasan permasalahan yang bersifat menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado adalah Satuan kerja perangkat daerah yang bergerak dibidang pekerjaan umum seperti: pembuatan jalan, jembatan, bangunan, irigasi dan sarana prasarana lainnya. Belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado adalah Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembuatan proyek proyek tersebut. Dana uang muka dari proyek proyek sebagian digunakan untuk pembelian sarana mobilitas dan peralatan lainnya yang nantinya akan menjadi aset tetap dari Dinas Pekerjaan Umum dan sisanya digunakan untuk pembelian bahan material dan pembayaran upah karyawan. Belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dicatat pada saat terjadinya pengeluaran pada rekening bendahara pengeluaran SKPD

Pencatatan

Dr. Belanja modal pengadaan komputer	Rp 30.000.000	
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		Rp 30.000.000
Dr. Belanja modal Pengadaan Stoom Walls	Rp 400.000.000	
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		Rp 400.000.000

Pembahasan

Belanja daerah merupakan instrument penting dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah diperlukan biaya atau pengeluaran. Dimana dana yang digunakan merupakan dana publik. sehingga dana tersebut harus digunakan secara efektif dan efisien agar besar alokasi dana yang dikeluarkan sesuai dengan kinerja aktual. Semua itu bisa tercapai apabila dana tersebut dikelola dengan baik dan benar. Pengakuan Belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas Pelaporan. Pengakuan Belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas Pelaporan sudah sesuai PP NO.71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan Cicilia (2012) menjelaskan pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas Umum Daerah. Hal ini berarti, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dan Dinas Perhubungan Kota Bitung sudah menerapkan akuntansi

belanjamodal sesuai dengan peraturan yang berlaku. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal meliputi : Belanja Tanah, belanja Peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja Jalan, irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal lapran keuangan belum selesai seluruhnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan.

Saran

Ada beberapa hal yang ingin diusulkan penulis dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk tahun anggaran selanjutnya diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado tetap berpedoman pada PP No. 71 tahun 2010 agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan benar
2. Tambah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki spesialis di bidang akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan handal

DAFTAR PUSTAKA

- Cicilia Indah S.Vera, 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.(Studi Kasus pada Dinas Kesehatan). Skripsi, (*tidak dipublikasikan*) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal. 58
- Galeanto .A. Hengky 2012. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Luwuk Banggai. Skripsi, (*tidak di publikasikan*) . Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal. 60
- Halim Abdul dan Mohammad Kusnufi, 2010. *Akuntansi Keuangan daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul dan Muhammad Iqbal, 2007. *Penelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat, 2009. *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi edisi 3*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lestari A Rima, 2014. Penerapan Akuntansi Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 Vol.2. No 2 Juni 2014 tanggal Akses 05 September 2014 Hal 1472

Mardiasmo .2009. *Akuntansi sektor Publik Edisi Revisi*, Penerbit Salemba empat, Jakarta.

Mahmudi, 2010, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga Jakarta

Mahsun.2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Tafsir, M. H. Anggela.2014. analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Modal pada DPAKKD pemda Kota Palu. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol .2 tanggal Akses 05 Oktober 2014. Hal. 411

Tanjung, H. Abdul. 2012. *Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

